



Membangun Kemandirian Ekonomi untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Program “Bela Beli Kulon Progo”

Fitria Nurma Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No.4, Surabaya 60286, Indonesia

e-mail: fitria.nurma.sari-2018@pasca.unair.ac.id

Abstract

Poverty is still a major problem in Indonesia. To overcome the problem of poverty, the government has tried to develop various programs that want to alleviate the poverty of its citizens. However, not infrequently these programs do not go according to plan and cannot reach the goal. In contrast to these problems, the Kulon Progo community has persistent leaders in fighting for the rights of their people. The integration of an independent economy was created, and only a few years of running programs can alleviate poverty. This study aims to explain one of the keys to the success of the poverty alleviation program implemented by the Regent of Kulon Progo by using descriptive qualitative studies. This study has found that one of the most important factors in the success of the "Bela Beli Kulon Progo" program is the optimal utilization of local resources in the Kulon Progo Regency area. The success of the program was proven by field data showing a decrease in the percentage of poverty and an increase in Gross Regional Income in the Kulon Progo Regency area.

Keywords: *poverty alleviation, independence, local resources*

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang ada di Indonesia. Pemerintah telah berusaha dengan membentuk berbagai program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan warganya. Namun tidak jarang program-program tersebut prosesnya tidak berjalan sesuai rencana dan tidak dapat mencapai tujuan. Berbeda dengan kondisi kegagalan tersebut, masyarakat Kulon Progo memiliki pemimpin yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Terciptalah integrasi bidang ekonomi daerah yang mandiri, dan hanya beberapa tahun program yang dijalankan dapat mengentaskan kemiskinan. Studi ini bertujuan untuk memaparkan salah satu kunci kesuksesan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Bupati Kulon Progo dengan menggunakan studi kualitatif deskriptif. Penelitian ini memiliki temuan bahwa salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan program “Bela Beli Kulon Progo” adalah pemanfaatan secara optimal sumber daya lokal di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kesuksesan program tersebut terbukti dengan data-data lapangan yang menunjukkan penurunan persentase kemiskinan dan peningkatan Pendapatan Daerah Regional Bruto di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Kata kunci: pengentasan kemiskinan, kemandirian, sumber daya lokal

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat desa secara umum memiliki kelemahan untuk bisa mengembangkan potensinya secara mandiri. Kelemahan tersebut salah satunya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan akibat perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Akibatnya masyarakat pedesaan mengalami kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan pihak lain untuk membantu mereka dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mampu keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Pihak tersebut bisa personal, LSM, maupun pemerintah (Gitosaputro dan Rangga, 2015).

Peran pemerintah sangatlah penting dalam menangani kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan karena hal tersebut merupakan tugas dan salah satu dari tujuan pemerintah itu sendiri. Namun sebagai pihak luar, pemerintah dalam memberikan bantuan pada masyarakat perlu untuk memperhatikan potensi yang dimiliki masyarakat. Potensi masyarakat salah satunya berupa sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan pemerintah guna menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketidaksejahteraan (Gitosaputro dan Rangga, 2015:92).

Manusia sebagai khalifah fil 'ard (pemimpin di bumi) diberikan amanah oleh Allah SWT untuk mengelola bumi beserta segala isinya untuk digunakan sebesar-besarnya demi kemaslahatan umat. seperti makna yang terkandung dalam Surah Al-A'raf ayat 69.

QS. Al A'raf (7) ayat 69 :

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ
مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَأَذْكَرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ
مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۖ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً ۗ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya:

Apakah kalian (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

Quraish Shihab menafsirkan bahwa makna dari “menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa)” dalam ayat tersebut adalah pengganti-pengganti yang berkuasa dan yang bertugas memakmurkan bumi (Lisnawati dkk, 2015:53). Salah satu cara dalam memakmurkan bumi adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang ada di bumi untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Sudah seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara arif dan bijak dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya agar tercipta kehidupan yang sejahtera. Begitupun pemerintah, sebagai pemimpin dari masyarakat yang diberikan wewenang untuk mengelola segala sumber daya yang dimiliki masyarakat seharusnya berusaha memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pada umumnya, pemerintah dalam kebijakan program pengembangan masya-

rakyatnya, sering mengabaikan sumber daya lokal. Pemerintah tidak melihat sumber daya lokal tersebut sebagai sesuatu yang bisa mendukung program pengentasan kemiskinan. Mustangin (2017) menyatakan bahwa Indonesia memiliki beragam potensi, baik alam maupun budaya yang bisa dimanfaatkan, namun potensi tersebut tidak banyak dimanfaatkan. Seharusnya sebagai pihak luar yang ingin mengembangkan masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan potensi internal dari masyarakatnya. Pemanfaatan sumber daya lokal dalam melakukan penyejahteraan masyarakat justru akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kebijakan program tersebut karena sumber daya tersebut sudah tersedia di masyarakat dan mudah dijangkau sehingga lebih mudah pemanfaatannya bagi masyarakat.

Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo merupakan masyarakat dengan karakteristik pedesaan karena sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian (agraris). Hal tersebut dapat terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian yang mencapai 23,87 persen. Struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo juga menunjukkan bahwa sektor pertanian termasuk dalam 3 sektor teratas yang mendominasi diikuti dengan sektor perdagangan kemudian sektor jasa, hotel, dan restoran (Pemkab Kulon Progo, 2014:58).

Seperti karakteristik masyarakat desa pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Kulon Progo juga memiliki kelemahan dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Keberadaan sumber daya lokal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial yang ada di Kabupaten Kulon Progo tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakatnya sendiri. Padahal sebagai daerah pedesaan, Kabupaten Kulon Progo memiliki sumber daya yang melimpah. Ketidakmampuan memanfaatkan sumber daya tersebut menimbulkan masalah kemiskinan dan ketidaksejahteraan di masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Terbukti dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo (Kristianto, 2015:20). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2012, persentase kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo paling tinggi diantara wilayah lainnya di Provinsi DIY, yaitu sekitar 24 persen (Susilo & Rijanta, 2017:2). Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kulon Progo berusaha menanggulangi kemiskinan, salah satu caranya dengan mengadakan Program Bela Beli Kulon Progo yang diluncurkan secara resmi pada tanggal 25 Maret 2013 oleh Bupati Kulon Progo di Alun-alun Wates (Kristianto, 2015:20).

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2018

Kab/Kota	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
D.I. Yogyakarta	12,13	13,02	13,34	14,91	14,55	15,03	15,88	16,14
Kulonprogo	18,30	20,03	20,30	21,40	20,64	21,39	23,32	23,62
Bantul	13,43	14,07	14,55	16,33	15,89	16,48	16,97	17,28
Gunungkidul	17,12	18,65	19,34	21,73	20,83	21,70	22,72	23,03
Sleman	7,65	8,13	8,21	9,46	9,50	9,68	10,44	10,61
Yogyakarta	6,98	7,64	7,70	8,75	8,67	8,82	9,38	9,62

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Tabel 1 menunjukkan perbandingan persentase kemiskinan di kabupaten/kota di DIY yang menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki persentase kemiskinan yang paling tinggi di antara kabupaten/kota lainnya di DIY.

Program Bela Beli Kulon Progo merupakan salah satu program pengembangan masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang memanfaatkan sumber daya lokal. Program ini menjadi salah satu program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo karena dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 tertulis bahwa “sebagai upaya untuk akselerasi pembangunan daerah juga dilakukan dengan optimalisasi potensi lokal dengan penguatan usaha dan pemasaran produk lokal lebih intensif terutama untuk masyarakat Kulon Progo”.

Program ini menghendaki agar masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dapat mandiri secara ekonomi dengan cara menjadi produsen maupun konsumen dari produk-produk lokal, sehingga diharapkan nantinya masyarakat Kabupaten Kulon Progo itu sendiri yang menguasai pasar lokal (Susilo & Rijanta, 2017:4). Ide pengadaaan program ini tidaklah datang secara tiba-tiba. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Bupati Hasto Wardoyo mencetuskan program ini karena terinspirasi oleh gerakan Beli Indonesia yang digagas oleh Heppy Trenggono yang merupakan ketua dari Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) (Susilo & Rijanta, 2017:4).

Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Namun, Program Bela Beli Kulon Progo merupakan salah satu program yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan

data Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dan BPS Kabupaten Kulon Progo, terjadi penurunan persentase kemiskinan dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Pada tahun 2011, persentase kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sebesar 23,62 persen. Setelah dijalankannya Program Bela Beli Kulon Progo, persentase kemiskinan di tahun 2013 turun menjadi sebesar 23,32 persen. Persentase tersebut terus menurun pada tahun-tahun berikutnya selama pelaksanaan Program Bela Beli Kulon Progo, yaitu pada tahun 2014 sebesar 20,64 persen dan pada tahun 2018 sebesar 18,3 persen. PDRB Kulon Progo pada tahun 2011 sebesar 13,97 juta rupiah meningkat menjadi 18,74 juta rupiah di tahun 2015.

Oleh karena itu, menjadi menarik untuk membahas pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Sebab jarang sekali pemerintah dalam mengadakan program yang mempertimbangkan potensi lokal masyarakatnya dan mampu mencapai keberhasilan yang cukup signifikan dalam penurunan angka kemiskinan. Pemanfaatan sumber daya lokal ini juga sesuai dengan prinsip di dalam ayat Al-Qur'an bahwa manusia sebagai khalifah fil 'arḍ diberikan amanah oleh Allah SWT untuk mengelola segala sumber daya yang ada secara arif dan bijak yang ditujukan pada kemaslahatan umat. Selain itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa Indonesia masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi, untuk mengatasinya dibutuhkan ide-ide tentang program pengentasan kemiskinan yang efektif, dan salah satu idenya adalah dari Program Bela Beli Kulon Progo yang mengajarkan arti kemandirian bangsa.

Identifikasi Masalah

Penelitian ini meneliti sumber daya lokal yang digunakan dalam Program Bela

Beli Kulon Progo. Sumber daya lokal dalam penelitian ini dibatasi pada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial. Ketiga jenis sumber daya tersebut telah teridentifikasi digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Program Bela Beli Kulon Progo. Selain itu, pembatasan pada tiga sumber daya tersebut dikarenakan ketiganya merupakan sumber daya yang secara umum dimiliki oleh setiap masyarakat dan sering dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan masyarakat.

Program Bela Beli Kulon Progo baru dilaksanakan pada bulan Maret 2013. Penelitian ini dibatasi pada Program Bela Beli Kulon Progo selama kurun waktu tahun 2013-2017 karena data paling banyak tersedia merupakan data hasil penelitian pada tahun tersebut. Tahun 2013 adalah tahun permulaan program dijalankan, sedangkan pada tahun 2017 merupakan data terakhir yang dapat ditemukan terkait dengan Program Bela Beli Kulon Progo.

Selain itu, peneliti mengamati bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan tujuan dari Program Bela Beli Kulon Progo. Hal tersebut dikarenakan tujuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang mengharapkan program ini dapat dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, yang diteliti adalah terkait dengan kegiatan dalam Program Bela Beli Kulon Progo yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan cara-cara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki masyarakatnya dalam Program Bela Beli Kulon Progo pada tahun 2013-2017.

Pengembangan Masyarakat

Menurut Gitosaputro dan Rangga (2015) pengembangan masyarakat merupakan

program yang terorganisir untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui kemandirian dan asas koperatif yang didukung dengan adanya bantuan dari pihak lain seperti pemerintah, swasta, dan LSM. Kemudian, pengembangan masyarakat merupakan metode dalam mengikutsertakan sekelompok orang di pedesaan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonominya, sehingga menjadi kelompok yang dapat bekerja secara mandiri dalam mengembangkan kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya. Prosesnya, pengembangan masyarakat bisa dilakukan melalui intervensi dari pihak eksternal maupun dilakukan melalui inisiatif masyarakatnya (Gitosaputro & Rangga, 2015).

Sumber Daya Lokal

Sumber daya merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses kegiatan (Theresia dkk, 2014). Sumber daya sering dikaitkan dengan potensi, ataupun aset. Komunitas di tingkat lokal dalam perjalanan waktu telah mengembangkan suatu aset yang menjadi sumber daya ataupun potensi bagi komunitas tersebut guna menghadapi perubahan yang terjadi (Adi, 2013:237). Sumber daya lokal adalah sumber daya yang berasal, tersedia, atau digali dari wilayah setempat yang masih termasuk dalam batasan geografis komunitas (Theresia dkk, 2014).

Sumber daya lokal yang merupakan milik masyarakat sendiri, membuat mereka mampu menyediakan sumber daya tersebut secara mandiri dengan biaya yang murah. Pemanfaatan sumber daya lokal pada prinsipnya adalah bagaimana cara kita dalam mengubah sumber daya yang bersifat potensial menjadi bersifat faktual (Gitosaputro & Rangga, 2015:92).

Klasifikasi sumber daya lokal menjadi 3 jenis yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial. Unsur dalam sumber daya dirincikan menjadi (1)

Sumber daya Alam meliputi ekosistem alam, flora, fauna; (2) Sumber daya manusia meliputi perilaku, sikap mental, pengetahuan, keterampilan, karakter, pendidikan, kesehatan; dan (3) sumber daya sosial meliputi kelembagaan, modal sosial, kearifan lokal, orientasi nilai budaya, serta sentimen komunitas (Santosa, 2014).

Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal

Pengembangan masyarakat berbasis sumber daya lokal adalah usaha dari pihak tertentu, baik yang berasal dari internal atau eksternal masyarakat, dalam memberikan bantuan kepada masyarakat (terutama masyarakat pedesaan) yang caranya dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat agar bisa mencapai kesejahteraan (Santosa, 2014). Kesejahteraan yang dimaksud di sini lebih ditekankan pada kesejahteraan ekonomi, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan.

Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Pemanfaatan merupakan aktivitas memanfaatkan, yaitu suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadikan sesuatu memiliki manfaat atau nilai guna. Prinsip dari pemanfaatan sumber daya adalah mengubah sumber daya yang bersifat potensial menjadi sumber daya yang bersifat faktual (Gitosaputro & Rangga, 2015:92). Oleh karena itu, aktivitas pemanfaatan sumber daya lokal yang dilakukan oleh subyek pengembangan masyarakat merupakan aktivitas penggalan seluruh potensi yang ada pada sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat di daerah tersebut.

Contohnya adalah pemanfaatan pengetahuan lokal yang potensial mendukung pengembangan masyarakat di Jawa. Masyarakat Jawa memiliki *indigenous knowledge* (pengetahuan lokal) berupa Almanak Pranoto Mongso, yaitu pengetahuan lokal berupa kalender yang mengatur tentang tata cara mengelola usaha pertanian sesuai dengan siklus pergantian musim dan perubahan kondisi alam lainnya. Pengetahuan tersebut dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan terkait bidang pertanian sehingga bisa membantu masyarakat dalam mengelola pertaniannya (Santosa, 2014:120).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks khusus pada subyek penelitian guna memahami fenomena tersebut secara menyeluruh dengan menggunakan metode alamiah yang kemudian hasilnya disajikan melalui deskripsi berupa kata-kata dan bahasa (Moleong, 2012:6).

Penelitian ini berusaha memahami fenomena pemanfaatan sumber daya lokal oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada program Bela Beli Kulon Progo yang merupakan program pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini nantinya akan berupa deskripsi dari cara-cara pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam program pengembangan masyarakat Bela Beli Kulon Progo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Potensi Daerah Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Wates menjadi pusat dari daerah Kabupaten Kulon Progo. Wilayah Kabupaten Kulon Progo secara administratif terdiri atas 12 Kecamatan, 87 Desa, 1 Kelurahan, 918 Pedukuhan, 1.825 RW (Rukun Warga) dan 4.469 RT (Rukun Tetangga) dengan luas wilayah Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan adalah 586.627,512 ha (RJPMD, 2011-2016:17). Dengan luas wilayah tersebut, tentunya menjadi potensi bagi pemerintah untuk bisa mengembangkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Kulon Progo secara umum terbagi menjadi tiga jenis kawasan, yaitu kawasan pesisir, kawasan dataran, dan kawasan pegunungan. Dataran tinggi atau kawasan pegunungan yang ada di Kabupaten Kulon Progo merupakan perbukitan Manoreh (RJPMD, 2011-2016:18-19).

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang memiliki potensi alam yang cukup melimpah. Sebagai daerah agraris, sebagian besar penduduk Kabupaten Kulon Progo sebanyak 44,14% bekerja di sektor pertanian. Luas lahan pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo juga mendominasi penggunaan lahan yang ada. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kulon Progo, kecuali kecamatan Kokap, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian, khususnya pertanian lahan basah (persawahan) (RJPMD, 2011-2016:27-33).

Pertanian Kabupaten Kulon Progo termasuk pertanian yang subur karena bisa mencapai surplus beras. Dikatakan surplus karena konsumsi beras rata-rata masyarakat Kabupaten Kulon Progo hanya sebesar

38.805 ton yang lebih kecil dibandingkan hasil produksi beras yang rata-rata sekitar 72.837 ton. Sementara itu, pada sektor perkebunan di Kabupaten Kulon Progo terdapat perkebunan kopi, kakao, kelapa dan sebagainya (RJPMD, 2011-2016:34).

Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi sumber mata air yang cukup melimpah karena memiliki wilayah dataran tinggi. Terdapat beberapa sumber mata air dan air tanah yang tersedia dan belum semuanya dimanfaatkan (RJPMD, 2011-2016:24). Sebagian besar pemanfaatan sumber mata air tersebut dilakukan oleh PDAM.

Selain potensi alam, terdapat juga potensi kebudayaan di masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Contohnya seperti makanan khas masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang salah satunya adalah gebleg renteng yang merupakan makanan olahan yang terbuat dari tepung tapioka.

Program Bela Beli Kulon Progo

Program Bela Beli Kulon Progo merupakan salah satu program pengembangan masyarakat dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang memanfaatkan sumber daya lokal. Program ini menjadi salah satu program pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo karena dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 tertulis bahwa “sebagai upaya untuk akselerasi pembangunan daerah juga dilakukan dengan optimalisasi potensi lokal dengan penguatan usaha dan pemasaran produk lokal lebih intensif terutama untuk masyarakat Kulon Progo. Tujuan program ini untuk membangun kemandirian daerah dan pengentasan kemiskinan”.

Beberapa produk lokal yang didukung oleh Program Bela Beli Kulon Progo yakni Beras Daerah (Rasda), Beras Menor, Batik Gebleg Renteng, AirKU, batu andesit, Gula semut, jam kayu, teh, kopi, kecap, kerajinan serat alam, serta produk-produk lain khas

Kulon Progo. Saat ini produk-produk lokal tersebut menjadi produk unggulan yang dipasarkan di mayoritas minimarket yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Pemanfaatan Sumber Daya dalam Bela Beli Kulon Progo

Program Bela Beli Kulon Progo merupakan program pengembangan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya lokal Kabupaten Kulon Progo. Pada pengembangan masyarakat berbasis sumber daya lokal, terdapat tiga jenis sumber daya yang dimanfaatkan yakni yang pertama adalah sumber daya alam atau modal lingkungan adalah berupa alam lingkungan sekitar yang belum diolah dan bernilai ekonomi tinggi yang dalam pengelolaannya tersebut berdampak untuk membantu upaya pelestarian alam yang dapat menciptakan kehidupan nyaman bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya (Adi, 2013:246).

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengetahui bahwa Kulon Progo memiliki potensi alam berupa air dan pertanian. Hal tersebut dapat terlihat pada program Rasda dan AirKU yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Kulon Progo.

Pemerintah mengetahui kondisi pertanian di Kulon Progo yang mengalami surplus beras namun kurang dimanfaatkan. Hal tersebut diketahui dari perbandingan antara jumlah produksi beras dengan jumlah konsumsi beras masyarakat dalam setahun. Hasil panen para petani bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dengan adanya program Rasda. Pemerintah membantu para petani mengembangkan hasil panennya dengan memberikan pendampingan dan penyuluhan dalam pengolahan padi agar bisa menghasilkan beras yang layak dijual di pasaran sesuai standar yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga memberikan kepastian pasar kepada para petani dengan menghimbau

para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membeli beras dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang menjual beras hasil panen petani Kulon Progo. Gapoktan merupakan lembaga yang kedudukannya penting karena menjadi penadah gabah hasil produksi petani Kulon Progo sehingga para petani tersebut tidak perlu menjual gabah ke tengkulak yang justru menyulitkan mereka. Kedudukan Gapoktan mirip seperti koperasi namun dalam pertanian, tugasnya mengumpulkan gabah hasil panen dari para petani kemudian disetor ke Bulog.

Saat ini pemerintah juga menjadikan beras hasil produksi petani yang diserahkan kepada Gapoktan sebagai sumber Beras Miskin (Raskin) yakni beras yang dikhususkan untuk bantuan kepada masyarakat miskin. Dengan demikian, Raskin yang diterima oleh masyarakat miskin di Kabupaten Kulon Progo berasal dari petani yang ada di Kulon Progo itu sendiri. Melalui program Rasda tersebut, rantai distribusi beras dari produsen ke konsumen menjadi lebih singkat sehingga harga beras juga menjadi lebih murah.

Pemerintah juga mengetahui adanya potensi sumber mata air yang bisa diolah menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sumber mata air di Clereng yang sebelumnya oleh PDAM Tirta Binangun hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk MCK, bisa dioptimalkan menjadi sumber air minum bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo melalui AMDK AirKU. Dengan program pengadaan AMDK ini, diharapkan kebutuhan air minum masyarakat Kulon Progo tidak lagi mengandalkan produk dari luar, tetapi bisa memperolehnya dari hasil produksi dalam daerahnya sendiri. Keuntungan dari penjualan air AMDK AirKU ini nantinya juga akan dinikmati oleh Masyarakat Kabupaten Kulon Progo sendiri karena penjual dari AirKU adalah PDAM Tirta Binangun yang merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Kabupaten Kulon Progo. Hasil

penjualan akan masuk ke pendapatan daerah dan bisa digunakan pemerintah daerah untuk mengadakan program-program menyejahterakan masyarakat.

Kekayaan alam di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya dimanfaatkan secara langsung, tetapi juga dimanfaatkan secara tidak langsung melalui motif batik Gebleg Renteng. Sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Kulon Progo dimanfaatkan menjadi motif batik yang khas karena bisa mencerminkan identitas Kabupaten Kulon Progo dengan keindahan alamnya.

Sumber daya alam kedua yang dimanfaatkan yakni sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau modal manusia adalah tenaga, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mengendalikan teknologi yang dimiliki oleh manusia (Adi, 2013:254). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Pada pelaksanaan Rasda dan Beras PNS, banyak SDM yang terlibat, terutama para petani. Petani sebagai produsen beras sangat berperan penting untuk terlaksananya program tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memberikan bantuan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan agar para petani tersebut bisa berkembang kemampuannya dalam memproduksi beras yang kualitasnya bagus dan layak jual di pasaran. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas alat produksi seperti traktor untuk menanam padi dan mesin untuk penggilingan padi.

Pemerintah dalam program Beras PNS juga menggerakkan para PNS agar menjadi konsumen yang aktif mengkonsumsi beras dari para petani Kulon Progo. Caranya dengan memberikan himbuan pada para PNS untuk membeli beras petani Kulon Progo melalui Gapoktan yang ada. Hal ini membuat surplus beras dari petani Kulon Progo menjadi termanfaatkan secara maksimal karena selalu habis di pasaran.

Pada produksi batik motif Gebleg Renteng, pemerintah memanfaatkan sumber daya dari para pengrajin batik yang memang sudah memiliki keahlian membatik dan bisa memproduksi batik dalam jumlah banyak. Para pengrajin tersebut dikumpulkan dalam Asosiasi Batik Kulon Progo agar menjaga keaslian batik. Penyerapan tenaga kerja dikatakan maksimal dalam industri batik motif Gebleg Renteng ini karena pemerintah memiliki kebijakan yang mengatur produksi batik, bahwa tenaga kerja produksi hanya dilakukan oleh masyarakat asli Kabupaten Kulon Progo. Hal ini membuat banyak terserapnya banyak pembatik asli Kulon Progo. Sebelumnya mereka ini banyak bekerja di Yogyakarta kemudian kembali ke Kulon Progo untuk menjadi pembatik motif Gebleg Renteng.

Terakhir yakni sumber daya sosial. Sumber daya sosial atau modal sosial merupakan norma dan aturan yang bersifat mengikat dan mengatur pola perilaku masyarakat, unsur kepercayaan, serta jaringan antar warga masyarakat (Adi, 2013:258). Program pemerintah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga serta melakukan koordinasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pemerintah memanfaatkan dinas-dinas terkait yang dimilikinya untuk menjalankan program Rasda, Batik Motif Gebleg Renteng, dan AirKU. Pelaksanaan ketiga program tersebut juga dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta maupun pihak lainnya yang memang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program.

Pada program Rasda, pemerintah bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Drive DIY untuk mendistribusikan beras hasil produksi petani Kulon Progo menjadi Raskin kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pihak swasta juga dilibatkan sebagai investor program yang memberikan bantuan modal atau bahan produksi seperti benih dan pupuk.

Sedangkan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo, dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan kepada para petani agar bisa mengembangkan kemampuan bertani yang mereka miliki. Dinas pertanian juga dimanfaatkan kemampuannya dalam mengembangkan varietas benih unggul, yaitu benih padi menor.

Pada program AirKU, pemerintah Kulon Progo memanfaatkan BUMD setempat sebagai produsen karena memang sudah memiliki wewenang untuk mengembangkan sumber mata air yang ada menjadi produk air minum dalam kemasan yang mencukupi kebutuhan masyarakat. BUMD tersebut adalah PDAM Tirta Binangun. Semenatra itu, pada program motif batik Gebleg Renteng, pemerintah memanfaatkan kelompok pengrajin batik yakni UMKM yang memiliki industri skala kecil untuk memproduksi motif batik tersebut. Mereka kemudian diberikan sosialisasi terkait motif batik Gebleg Renteng.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, melakukan identifikasi potensi yang ada di Kabupaten Kulon Progo untuk bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kedua, membuat program yang memanfaatkan sumber daya lokal sehingga sumber daya tersebut bisa dioptimalkan kegunaannya. Sumber daya yang dimanfaatkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial.

Pemerintah memanfaatkan aspek sumber daya manusia pada Program Bela Beli Kulon Progo yakni berupa tenaga,

keterampilan, pengetahuan, dan ide dari masyarakat untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat seperti pelatihan kompetensi. Pada sumber daya alam, pemerintah memanfaatkan sumber daya alam baik yang hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan adalah tanaman padi penghasil beras. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yang dimanfaatkan adalah air. Pada sumber daya sosial, pemerintah memanfaatkan lembaga-lembaga yang dimilikinya seperti dinas-dinas terkait ataupun BUMD, Bulog Drive DIY, pembentukan Gapoktan, dan pemerintah memberikan anjuran kepada PNS untuk membeli produk beras dari petani Kulon Progo yang merupakan esensi kesuksesan dari pelaksanaan Program Bela Beli Kulon Progo.

REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Gitosaputro, S., & Rangga, K. K. (2015). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Teori, dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kristianto, Felix Arberd Nur. (2015). Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan “Bela Beli Kulon Progo. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 19-28.
- Lisnawati, Y., Abdussalam, A., & Wibisana, W. (2015). Konsep Khalifah dalam Al-Qur’ān dan Implikasinya terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Studi Maudu’I terhadap Konsep Khalifah dalam Tafsir Al-Misbah). *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 2(1), 47-57.

- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustangin. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(1).
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2014). Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2016). Proposal Inovasi Daerah: Mengganti Beras Miskin (Raskin) menjadi Beras Daerah (Rasda) di Kabupaten Kulon Progo.
- Susilo, E. G. B., & Rijanta, R. (2017). Kajian Implementasi “Bela-beli Kulon Progo” (Kasus: Air-ku, Batik Geblek Renteng, dan Tomira). *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(3).
- Santosa, Imam. (2014). *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber daya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). (2017). Prakarsa Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengurangan Kesenjangan Wilayah dan Pembangunan Daerah.
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

